



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA .

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  9. Kepala Badan Pusat Statistik;
  10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
  14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
  15. Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;
3. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,



Yusuf M. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah kumulatif SPM yang ditetapkan	13 SPM	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Kemendagri	
		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah	5 SPM	Desember 2010			
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pemberian NIK kepada setiap penduduk	Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk	329 kab/kota	Desember 2010	Tercapainya pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan dalam 3 tahun	Kemendagri	Kab/kota terkait
	Pemberian e-KTP berbasis NIK	Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK	4,2jt jiwa di 6 kab/kota	Desember 2010			
Pemantapan pengadaan barang dan jasa	Penguatan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Tersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 RUU	Desember 2010	Terwujudnya peningkatan efisiensi belanja negara	LKPP	
		Terlaksananya sosialisasi Perpres pengganti Keppres 80/2003 bagi seluruh instansi pusat dan daerah	100%	Desember 2010			
	Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terbentuknya LPSE baru di K/L/D/I dengan koordinasi LKPP	100 LPSE	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3)</sup>	SASARAN <sup>4)</sup>	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan metodologi dan kurikulum	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	100%	Desember 2010	Terwujudnya kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Kemendiknas	Daerah terkait
Penguatan pengelolaan sekolah	Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persentase kepala TK/SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	Desember 2010	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan unggul	Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala RA/MI yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala MTs yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan pendidikan agama	Peningkatan kualitas guru agama dan relevansi pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama	Persentase guru agama Islam yang mengikuti pelatihan kompetensi	10%	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pendidikan agama	Kemenag	
		Jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	5,000	Desember 2010		Kemenag	
		Jumlah santri yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	1,000			Kemenag	
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	500			Kemenag	
		Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan	Penyusunan Standar	Desember 2010		Kemenag	
Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan	Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan	Satuan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu	10.000	Desember 2010	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan	Kemendiknas	
		Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Peningkatan Independen Internasional	8	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	95	Desember 2010		Kemendiknas	
	Penerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah	Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	40%	Desember 2010		Kemendiknas	
		Persentase satuan pendidikan jenjang SMP menerapkan pembelajaran berbasis TIK	20%	Desember 2010		Kemendiknas	
	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government di sekolah (e-pendidikan)	Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan	50 sekolah	Desember 2010		Kemenkominfo	Pemda DIY



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>7)</sup>		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase)	9 kab/kota sistem air limbah <i>off-site</i> , 10 kab/kota penanganan drainase	Desember 2010		Kemen PU	kab/kota terkait
Pengawasan obat dan makanan	Penguatan upaya pengawasan obat dan makanan	Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa di 31 balai besar/Balai POM	15,000	Desember 2010	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Badan POM	
Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Penataan kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	Tersusunnya/disahkannya perangkat hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi: (1) Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) PP Penerima Bantuan Iuran (PBI); (3) Perpres Jaminan Kesehatan	100%	Desember 2010	Berkembangnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Kemenko Kesra	
Penyediaan obat esensial nasional	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	Desember 2010	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan	Kemenkes	
Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan (Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK dan Rumah Sakit) secara merata	Tersusunnya kebijakan dan peraturan perundangan mengenai masa bakti tenaga kesehatan strategis setelah lulus perguruan tinggi dan spesialisasi terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	100%	Desember 2010	Tersedianya 1200 tenaga kesehatan di Puskesmas Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan di Rumah Sakit	Kemenkes	kab/kota terkait
		Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	1200	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berpendapatan rendah	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	Desember 2010	Menurunnya angka kemiskinan	Kemenkes	
		Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8,481	Desember 2010		Kemenkes	Semua kab/kota
		Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	Desember 2010		Kemenkes	Daerah terkait
	Peningkatan intensitas pelayanan KB bagi masyarakat berpendapatan rendah	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	3,75 juta orang	Desember 2010		BKKBN	Daerah terkait
		2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	11,9 juta orang	Desember 2010			
	Penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2,767,300	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah siswa SMP/SMPB sasaran beasiswa miskin	966,100	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378,800	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305,550	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65,000	Desember 2010	Kemendiknas		
		Jumlah siswa MI miskin penerima beasiswa	750,000	Desember 2010	Kemenag		
		Jumlah siswa MTs miskin penerima beasiswa	600,000	Desember 2010			
	Jumlah siswa MA miskin penerima beasiswa	400,000	Desember 2010				
Bantuan Beasiswa Bakat dan prestasi siswa MTs	1,000	Desember 2010					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat dan anak serta pelayanan sosial bagi lansia	Jumlah penyandang cacat yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	34,900	Desember 2010		Kemensos	Daerah terkait
		Jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	159,500	Desember 2010			
		Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	22,040	Desember 2010			
Pemantapan PNPM mandiri	Penyusunan rencana integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM	Konsep rencana integrasi PNPM Inti dan Penguatan	100%	Desember 2010	Meningkatnya efektifitas PNPM Mandiri	Tim Pengendali PNPM Mandiri	
	Pemantapan pelaksanaan PNPM Inti	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500 kel, 884 kec di 246 kota	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait
		Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM	4791 kec	Desember 2010		Kemendagri	Daerah terkait
		Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di kab. Nias dan Nias Selatan	2 kab/9 kec.	Desember 2010		Kemen PU	Kab Nias/Nias Selatan
		Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	237	Desember 2010			Daerah terkait
		Jumlah kabupaten daerah tertinggal	51 kabupaten	Desember 2010		KPDT	Daerah terkait
	Peningkatan integrasi PNPM Penguatan	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30 kab/kota	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait
		Jumlah desa yang terfasilitasi air minum dan penyetatana lingkungan berbasis masyarakat	1.472 desa	Desember 2010		Kemen. PU	Daerah terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Peningkatan kualitas <i>targeting</i> dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Evaluasi dan analisa efektifitas sistem <i>targeting</i>	0.75	Desember 2010	Penyempurnaan pendataan RTS	Timnas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	
		Penyusunan SOP untuk <i>targeting</i>		Desember 2010			
		<i>Draft design</i> pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011		Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk	245 SKPD	Desember 2010		Kementan	Daerah terkait
		Jumlah kelembagaan petani (Gapoktan)	2.830 kelompok	Desember 2010			
		Jumlah BPP model	336 BPP	Desember 2010			
		Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang)	27.393 org	Desember 2010			
		Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian	30%	Desember 2010			
	Peningkatan produksi ternak ruminansia	Pengembangan sapi bibit potomg	21.000 ekor	Desember 2010		Kementan	Daerah terkait
		Pengembangan bibit sapi perah	1.250 ekor	Desember 2010			
		Pengembangan integrasi tanaman ternak	75 unit	Desember 2010			
	Penyediaan kapal nelayan di berbagai daerah	Mekanisme pelaksanaan dan monev pemberian kapal nelayan dan jumlah kapal yang diberikan kepada nelayan	60 unit	Desember 2010		Kemen KP	Daerah terkait
	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	178,18	Desember 2010		Kementan	
	Penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	11,06	Desember 2010		Kementan	
	Uji coba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani	Finalisasi kajian uji coba subsidi langsung	1 paket	Juni 2010		Kementan	
		Rancang bangun subsidi pupuk langsung ke petani	1 paket	Desember 2010			
Pilot project subsidi pupuk langsung ke petani		1 kabupaten	Desember 2010				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		
Pemenuhan konsumsi pangan dan kualitas gizi masyarakat	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.	1.750 desa	Desember 2010	Meningkatnya ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat	Kementan	Kab/kota terkait		
		Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan.	800 lumbung	Desember 2010			Kab/kota terkait		
		Penanganan daerah rawan pangan.	350 kab	Desember 2010			Kab terkait		
		Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	33 prop	Desember 2010			Seluruh provinsi		
		Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan.	33 prop	Desember 2010			Seluruh provinsi		
		Percepatan penganeka ragam konsumsi pangan	Terbinanya kelompok wanita dalam konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang	2000 desa			Desember 2010	Kementan	Daerah terkait
			Pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan non beras dan terigu	2000 kelompok			Desember 2010		Daerah terkait
	Sosialisasi dan promosi penganeka ragam konsumsi pangan		200 kabupaten	Desember 2010	Kab terkait				
	Berkembangnya teknologi pengolahan pangan lokal		33 provinsi	Desember 2010	Seluruh provinsi				
	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	750 kelompok	Desember 2010	Kementan	Daerah terkait			
		Data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.	33 prop	Desember 2010		Seluruh provinsi			
		Laporan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.	33 prop	Desember 2010		Seluruh provinsi			
	Peningkatan efisiensi pasar komoditi pangan	Pembangunan gudang-gudang pangan dan penyediaan peralatannya serta fasilitasi efektivitas pemanfaatannya	Tersusunnya masterplan pengembangan gudang-gudang pangan	1 paket	April 2010	Meningkatnya efisiensi distribusi dan logistik	Kemendag		
Tersedianya gudang-gudang pangan sesuai SK Mendag (jagung, beras, gabah, kopi, kakao, rumput laut, lada) di sentra-sentra produksi tingkat kabupaten/kota			12 gudang komoditi	6 bulan (Mei-November 2010)	Kemendag				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah	Sertifikasi tanah	495.620 bidang tanah (Prona sebanyak 139.620 bidang, UKM 30.000 bidang, Pertanian 23.000 bidang, DKP 30.000 bidang, Transmigrasi 30.000 bidang)	Desember 2010		BPN	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan <i>domestic connectivity</i>	Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT serta pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional	Panjang penyelesaian jalan lintas yang mendapat peningkatan kapasitas, yang terdiri dari :	1.579,79 km	Desember 2010	Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa	Kemen PU	Daerah terkait
		- Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran)	1.368,72 km	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang jalan lingkar/ <i>bypass</i> yang dibangun	18,4 km	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang jembatan yang dibangun	4.921 m	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun	184 km 491 m	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang <i>flyover/underpass</i> yang dibangun	3.262 m	Desember 2010		Kemen PU	
		Terbentuknya unit pengelola dana preservasi jaringan jalan	100%	Juli 2010		Kemen PU	
		Panjang jalan yang dipreservasi	32.349 km	Desember 2010		Kemen PU	
		Panjang jembatan yang dipreservasi	9.235,7 m	Desember 2010		Kemen PU	
		Penyusunan Sistem Transportasi Nasional dan cetak biru transportasi multi moda	Studi tinjau ulang arah kebijakan Sistranas dan Tatranas	2 dokumen		Desember 2010	
	Studi implementasi cetak biru transportasi antar moda/ multi moda		1 dokumen	Desember 2010		Kemenhub	
	<i>Masterplan</i> Integrasi Sistem Tiket Elektronik Transportasi untuk wilayah Jabodetabek sesuai cetak biru Transportasi Perkotaan di 4 kota besar		1 dokumen	Desember 2010		Kemenhub	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pengendalian banjir	Penyelesaian Kanal Banjir Timur	Terselesaikannya pembangunan KBT konstruksi utama paket 22 - 29	100%	Desember 2010	Mengurangi potensi banjir pada daerah rawan banjir	Kemenkeu (BA. 999)	Pemprov DKI Jakarta
	Pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo	Terselesaikannya Waduk Gonggang	100%	Desember 2010		Kemen PU	Pemprov Jateng
		Tersedianya prasarana pengendalian banjir (pompa air di 1 lokasi 2 unit pompa)	100%	Desember 2010		Kemen PU	
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Penyusunan <i>ICT Fund</i> untuk membiayai pembangunan jaringan <i>backbone</i> serat optik	Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan <i>ICT Fund</i> dan optimalisasi PNBPN untuk pembiayaan jaringan <i>backbone</i> serat optik	100%	Desember 2010	Meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan informasi dan komunikasi	Kemenkominfo	
Peningkatan Penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Kajian sistem penyediaan dana pembebasan tanah baik berupa dana talangan (non APBN) untuk proyek KPS yang layak secara finansial dan dukungan fiskal (APBN) untuk proyek KPS yang kurang layak secara finansial	100%	Agustus 2010	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	BPN	
		Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit penyedia dana talangan untuk pembebasan tanah di masing-masing Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek KPS atau di satu Kementerian/Lembaga	100%	November 2010		Kemenkeu	
		Unit dan mata anggaran (APBN) penyediaan dana dukungan fiskal untuk pembebasan tanah	100%	Oktober 2010		Kemenkeu	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penyederhanaan prosedur investasi dan usaha	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SP, IP, ISE) pada PTSP	Jumlah perizinan dan non perizinan sektor yang dilayani SPIPISE (setelah dilakukan penyederhanaan tata cara permohonan)	3 sektor	Desember 2010	Menurunnya hambatan investasi	BKPM	
		Jumlah PTSP provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SPIPISE	33 provinsi dan 40 kabupaten/kota	Desember 2010			Seluruh Provinsi; Kab/Kota terkait
		Jumlah instansi yang terintegrasi dengan SPIPISE	16 instansi	Desember 2010			
		Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP	130 PTSP	Desember 2010			
		Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal	1	Desember 2010			
	Rekomendasi pembatalan Perda bermasalah terkait investasi dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Jumlah Perda yang dikaji dan diusulkan untuk dibatalkan	1 paket	Desember 2010		Kemendagri	Daerah terkait
	Jumlah perizinan dan nonperizinan sektor untuk memulai usaha yang diusulkan untuk diturunkan/dihapuskan biayanya	1 paket	Desember 2010	Kemendag			





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
	Pengelolaan fasilitasi ekspor-impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (peraturan)	4	Desember 2010		Kemendag	
		Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor <i>online</i> melalui INATRADE (perusahaan)	1,500	Desember 2010			
	Perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanaan dan cukai	Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC	100%	Desember 2010		Kemenkeu	
		Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanaan yang terintegrasi dengan portal NSW	-	Desember 2010			
		PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanaan dan perpajakan	-	Desember 2010			
		PMK tentang <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	Desember 2010			
		PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabeaan Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik	-	Desember 2010			
Pelaksanaan <i>National Single Window</i> di sektor perhubungan	Jaringan <i>System National Single Window</i> di kantor pusat	1 paket	Desember 2010	Kemenhub			
Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha	Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	Tersusunnya rancangan peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT dan <i>outsourcing</i> ), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah akademis	Desember 2010	Meningkatnya kepastian berusaha	Kemenakertrans	
		Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		Desember 2010		Kemenakertrans	
		Selarasnya peraturan bidang HI	Inventarisasi Perda HI	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

**PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
		Mekanisme perundingan secara <i>bipartit</i> , pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	Desember 2010		Kemenakertrans	
Pengembangan perdagangan dalam negeri	Penguatan monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP	Tertindakannya monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP kepada Pemda kabupaten/kota dan identifikasi PERDA yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SIUP dan TDP	100 kab/kota	Desember 2010	Meningkatnya perdagangan dalam negeri	Kemendag	Kab/kota terkait
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Penyusunan peraturan perundangan bagi pengembangan (KEK)	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus pelaksanaan UU No 39/2009	1	Desember 2010	Ditetapkannya 1 KEK	Kemenko Perekonomian	
		Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	Desember 2010		Kemendag	
		Tersedianya PMK-PMK ttg pemberian fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema pembiayaan infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100%	Desember 2010		Kemenkeu	
	Pengembangan kelembagaan KEK	Pembentukan Dewan Nasional KEK	1 paket	Desember 2010		Kemenko Perekonomian	
		Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan promosi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	6 daerah dan 4 negara	Desember 2010		BKPM	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

PRIORITAS 8 : ENERGI

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
Ketahanan energi	Peningkatan pasokan listrik	Pembangkit, jaringan dan gardu transmisi :			Meningkatnya penyediaan listrik			
		- Kapasitas pembangkit MW), transmisi (Kms) dan gardu induk (MVA)	22 MW, 3381 Kms, 2159 MVA	Desember 2010		Kemen ESDM		
		Jaringan dan gardu distribusi :						
		- Gardu dan jaringan (Kms/MVA)	18.004 dan 1.266	Desember 2010		Kemen ESDM		
	Pengembangan Geothermal	Penambahan kapasitas PLTP (MW)		70		Desember 2010	Kemen ESDM	
		Revisi PP No.68/1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KPA/KSA)		1 judul		Desember 2010	Kemenhut	
	Pengembangan energi alternatif diluar panas bumi	Lisdes (EBT) :						
		- PLTS 50 Wp tersebar (MW)		3.55		Desember 2010	Kemen ESDM-DAK	
		- PLTMH (MW)		1.53		Desember 2010	Kemen ESDM-DAK	
		- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)		1		Desember 2010	Kemen ESDM	
DME		50 lokasi	Desember 2010	Kemen ESDM				
	Terlaksananya sosialisasi pengembangan energi nuklir untuk mencapai pemahaman masyarakat yang utuh			Desember 2010	Kemenristek/ BATAN			
Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan dan rumah tangga	FEED pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di 3 kota		3 kota	Desember 2010	Kemen ESDM			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan hutan	Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	239.000 ha	Desember 2010	Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan emisi karbon	Kemenhut	Daerah terkait
		Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 ha	Desember 2010			
		Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 ha	Desember 2010			
		Fasilitasi rehabilitasi hutan <i>mangrove</i> , gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 ha	Desember 2010			
		Fasilitasi rehabilitasi kawasan konservasi/lindung	100.000 ha	Desember 2010			
	Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	400.000 ha	Desember 2010		Kemenhut	Daerah terkait
		Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	100 klpk	Desember 2010			
		Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha	50.000 ha	Desember 2010			
		Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	Desember 2010			
		Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

**PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan pengelolaan DAS serta pengelolaan hutan dan lahan gambut	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas	22 DAS	Desember 2010	Menurunnya kerawanan bencana di DAS dan lahan gambut	Kemenhut	
		Terbangunnya <i>baseline</i> data pengelolaan DAS di 36 BPDAS	7 BPDAS	Desember 2010			
		Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	7 BPDAS	Desember 2010			
	Pengelolaan kualitas air dan kawasan gambut	% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah	25%	Desember 2010		KLH	Daerah terkait
		Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait	20%	Desember 2010	KLH	Daerah terkait	
Penurunan beban pencemaran lingkungan	Pengendalian pencemaran air dan udara	Menurunnya beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 690 kegiatan industri dan jasa	680	Desember 2010	Penurunan pencemaran lingkungan dan emisi karbon	KLH	
	Penyusunan peta kerentanan perubahan iklim sampai ke tingkat regional	Tersusunnya daftar kriteria baku kerusakan LH akibat perubahan iklim		Desember 2010		KLH	
Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menerapkan <i>sanitary land fill</i> dan mengoptimalkan program 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> )	Berkurangnya volume sampah melalui 3 R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan	26 kota besar dan metropolitan	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	KLH	Kota terkait
		Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur persampahan (TPA Regional)	6 TPA Regional melayani 17 kab/kota	Desember 2010		Kemen PU	Kab/kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dilaksanakan	27	Desember 2010	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	KPDT	Daerah terkait
	Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika	Prosentase desa yang dilayani akses internet (dengan prioritas pada seluruh desa Ibukota Kecamatan di wilayah <i>Universal Service Obligation</i> , sejumlah 4.218 desa)	5%	Desember 2010		Kemenkominfo	Daerah terkait
		Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>National Internet Exchange (4 kota)</i>	10%	Desember 2010		Kemenkominfo	Kota terkait
		Jumlah Desa Informatif termasuk ketersediaan radio komunitas	15 desa	Desember 2010		Kemenkominfo	Daerah terkait
	Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan khusus	46.300 orang	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah guru madrasah penerima tunjangan khusus	5.000 orang	Desember 2010			
	Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pembangunan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi lintas sektor	20%	Desember 2010		KPDT	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22				
		Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60				
		Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3				
		Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3				
	Inventarisasi data dan penamaan pulau-pulau kecil terluar	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	Desember 2010		Kemen KP	Daerah terkait
		Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENYELESAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Pemantapan reintegrasi Aceh	Penyusunan peraturan perundangan untuk memperkuat reintegrasi Aceh	Terbitnya 3 PP dan 2 Perpres tindak lanjut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh	100%	Desember 2010	Mantapnya pelaksanaan reintegrasi Aceh	Kemendagri Pemprov NAD
Pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme	Pemantapan penanggulangan tindak terorisme	Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi, dan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme	12 kali	Desember 2010	Terwujudnya NKRI yang lebih kokoh dan menurunnya tindak terorisme	Kemenko Polhukam
		Terbitnya Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) dan tersusunnya Rencana Induk Program Deradikalisasi	100%	Juni 2010		Kemenko Polhukam
		Jumlah pengungkapan perkara tindak pidana terorisme dan <i>Clearance Rate</i> tindak pidana terorisme tingkat nasional	100%	Desember 2010		POLRI
	Penyusunan RUU Keamanan Nasional	Draft RUU Keamanan Nasional	100%	Desember 2010		Kemenhan
	Pemberian tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan	Perpres tentang tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan	100%	Desember 2010		Kemenhan
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi	Jumlah penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	145 pkr	Desember 2010	Menurunnya tindak pidana korupsi	Kejagung





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan industri nasional	Pengembangan kluster industri berbasis pertanian, <i>oleochemical</i>	<i>Business Plan</i> Nasional Industri Hilir Kelapa Sawit	1 paket	Desember 2010	Menguatnya struktur dan berkembang daya saing industri nasional	Kemenperin	Pemprov Sumut, Pemprov Riau dan Pemprov Kaltim
		Penyelesaian AMDAL, FS dan <i>Business Plan</i> oleh Pemda Sumut, Riau (Kuala Enok dan Dumai), Kaltim	1 paket	September - Desember 2010			
	Pengembangan kluster industri berbasis migas kondensat	Kajian pembangunan <i>refinery</i> di Jatim dan bahan baku alternatif dalam dan luar negeri	2 paket	Desember 2010			
		Koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan <i>kondensat</i> di Jawa Timur dan Kaltim	2 paket	Desember 2010			
		Kajian bahan baku alternatif	1 paket	Desember 2010			
		Penyusunan <i>Business Plan</i>	1 paket	Desember 2010			
Pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha baru.	Peningkatan pemasyarakatan kewirausahaan dan penyediaan dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya.	Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan	2.000 orang	Desember 2010	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Kemen KUKM	Daerah terkait
		Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun.	200 unit	Desember 2010			
		Jumlah calon wirausaha baru.	1.000 orang	Desember 2010			
		Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.	350 KUMK	Desember 2010			
		Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator.	10 inkubator	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar	Peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji (210.000)	Biaya operasional kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi	Desember 2010	Terlaksananya pelaksanaan ibadah haji dengan lebih baik	Kemenag			
		Jumlah kabupaten dan kota yang terpasang Siskohat <i>online</i>	75				Desember 2010	Kab/kota terkait
		Jumlah Siskohat yang di <i>upgrade</i>	260				Desember 2010	
		Jumlah asrama haji yang direhabilitasi	6				Desember 2010	
		Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar	30				Desember 2010	Kab/kota terkait
Peningkatan pariwisata	Peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan ( <i>sales mission</i> ), dan pendukung penyelenggaraan festival ( <i>event</i> )	72	Desember 2010	Kemenbudpar			
		Jumlah penyelenggaraan promosi langsung ( <i>direct promotion</i> ), dan penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional.	43	Desember 2010				
Peningkatan prestasi olahraga Indonesia	Penyiapan atlet andalan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah atlet andalan untuk persiapan Asian Games dan Sea Games serta tersedianya sarana dan prasarana Sea Games	518 atlet	Desember 2010	Kemenpora			
Peningkatan partisipasi pemuda dalam Gerakan Kepanduan	Pengembangan Gerakan Kepanduan	Tersusunnya kebijakan pengembangan kepanduan	100%	Desember 2010	Kemenpora			